

Strategi Pidato Pejabat dan Politisi Indonesia dalam Debat di Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club

Fauzi Rahman^{1*)}

Zainal Rafli²

Ifan Iskandar³

Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*) Penulis Korespondensi: Jln. Letda Natsir, Wanaherang-Gunungputri, Kabupaten Bogor, Indonesia
Posel: fauzi_9906922001@mhs.unj.ac.id

Abstrak: Dalam kegiatan debat, terutama debat politik, para pembicara tidak selalu menyampaikan argumen dengan cara yang sama. Kadang-kadang, pembicara menyampaikan ide-ide mereka dengan ramah dan lembut, pada lain waktu mereka menggunakan bahasa yang mengandung konotasi negatif, dan terkadang mereka juga diam dan tidak mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang strategi berbicara yang digunakan oleh pejabat dan politisi Indonesia selama debat politik di saluran YouTube. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan teknik simak-catat. Sumber data penelitian terdiri dari tuturan yang disampaikan oleh pejabat dan politisi selama acara debat di saluran YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC). Analisis data dilakukan melalui transkripsi dan interpretasi strategi bertutur berdasarkan kerangka kerja Brown dan Levinson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tanpa upacara digunakan untuk merespons lawan bicara yang tidak substansial dan tidak sopan. Selain itu, strategi kesopanan positif umumnya digunakan dalam debat kebijakan politik oleh pihak yang mendukung atau mewakili pemegang kebijakan politik. Di sisi lain, strategi kesopanan negatif dalam debat politik biasanya digunakan oleh pembicara dari pihak oposisi, yang menawarkan kritik terhadap kebijakan politik. Selain itu, strategi samar digunakan oleh pembicara dalam debat politik sebagai cara untuk menekan dan menolak ide-ide yang diajukan, terlepas dari apakah ide-ide rekan bicara lengkap atau tidak. Terakhir, tidak ada strategi untuk tetap diam atau berbicara dengan diam dalam debat politik.

Kata Kunci: Debat politik, strategi bertutur, ILC, YouTube

Speech Strategy by Indonesian Officials and Politicians in Debates on the Indonesia Lawyers Club YouTube Channel

Abstract: In debating activities, especially political debates, speakers do not always present arguments in the same manner. At times, speakers convey their ideas kindly and gently, while other times they employ diction that carries negative connotations, and sometimes they remain silent and say nothing. Therefore, this study aims to conduct an in-depth analysis of the speech strategies employed by Indonesian officials and politicians during political debates on the YouTube channel. The research was conducted using a qualitative methodology, with notes taken throughout the process. The method utilized is qualitative, employing a note-taking technique. The research data source consisted of speeches delivered by officials and politicians during a debate event on the Indonesia Lawyers Club (ILC) YouTube channel. Data analysis was conducted through the transcription and interpretation of spoken strategies based on Brown and Levinson's framework. The results revealed that an unceremonious strategy was utilized to respond to unsubstantial and unceremonious speech opponents. Additionally, positive civility strategies were generally employed in political policy debates by parties who support or represent political policyholders. On the other hand, the strategy of negative politeness in political debates was typically employed by speakers from the opposition, offering criticism of political policies. Moreover, vague strategies were utilized by speakers in political debates as a means to suppress and resist the ideas put forth, regardless of whether the ideas of the speech partners were complete or not. Lastly, there is no strategy of remaining silent or speaking silently.

Keywords: Political debate; speech strategy; ILC; YouTube.

Proses artikel: Dikirim: 26-12-2022; Direvisi: 10-06-2023; Diterima: 30-06-2023; Diterbitkan: 30-06-2023

Gaya sitasi (MLA edisi ke-7): Rahman, Fauzi, Zainal Rafli, and Ifan Iskandar. "Strategi Pidato Pejabat dan Politisi Indonesia dalam Debat di Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club." *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7.1 (2023): 10–21. Print/Online. **Pemegang Hak Cipta:** Fauzi Rahman, Zainal Rafli, Ifan Iskandar. **Publikasi Utama:** Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2023).



Proses ini berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.

Pendahuluan

Politik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara (Curlin and Hall). Di Indonesia, karena sistem negara yang dianut adalah demokrasi, maka memungkinkan adanya partisipasi politik yang sangat kuat (Anshori). Dalam sistem demokrasi ini, pelaksanaan pemerintahan yang demokratis haruslah memberikan hak-hak asasi manusia di mana pemerintah yang berkuasa wajib melindunginya (Hermawan). Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi—seperti di Indonesia—kebijakan-kebijakan yang muncul akibat produk pemerintahan kerap kali menimbulkan perdebatan antara pendukung kebijakan dan penolak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, debat-debat politik di negara demokrasi banyak terjadi dan diakomodasi oleh media-media yang ada di negara tersebut (Bjørnskov and Rode).

Debat-debat politik semakin hari semakin banyak ditemukan di berbagai media. Debat ini tidak hanya membahas tentang proses elektoral, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang muncul dari situasi politik yang tengah dikendalikan oleh para pemimpin politik. Debat dalam hal ini merupakan pertukaran pendapat tentang suatu isu yang tengah beredar dengan mempertahankan argumentasi masing-masing di hadapan lawan debat dengan data-data yang mendukung gagasan (Kurniawati et al.).

Debat politik menjadi acara yang banyak diminati masyarakat. Salah satu acara yang mengakomodasi kegiatan debat politik adalah *ILC (Indonesia Lawyers Club)*. Acara ini setelah terhenti di TV, melanjutkan kegiatannya melalui akun *YouTube ILC* (Herman and Manaf). Dalam debat politik yang disiarkan *ILC*, selalu tampak sikap dari tokoh-tokoh yang hadir, baik sebagai perwakilan dari pemilik kebijakan maupun pihak yang memberikan penolakan terhadap kebijakan untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran kritis masing-masing. Perwakilan pemerintah tentu harus mempertahankan, mengemban tugas, dan menjalankan fungsi dari partai atau kebijakan yang didukungnya. Tokoh oposisi juga tentu berlaku sebaliknya, terus mempertahankan, memberikan pikiran kritis, dan menunjukkan dampak-dampak tertentu jika kebijakan yang dikeluarkan tidak ditinjau ulang (Kurniawati et al.).

Setiap penayangan debat politik yang menampilkan pejabat, politisi, aktivis, dan pengamat politik ini menarik banyak penonton. Dalam salah satu video berjudul *Pasal Penghinaan Presiden & Pejabat Negara Masih Dicantumkan Situasi Di Ilc Memanas!!!*, jumlah *viewers* adalah yang tercatat adalah sebanyak 607 ribu penonton dengan komentar aktif sebanyak 5.063 komentar per 1 Desember 2022. Data ini menunjukkan perhatian dan animo masyarakat terhadap debat-debat politik cukup tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Dhani menunjukkan bahwa acara-acara diskusi dan debat politik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat partisipasi politik masyarakat. Acara-acara di televisi yang menayangkan debat memberikan pengaruh kuat dan dapat mengubah sikap politik masyarakat (Wijayanti and Dhani).

Debat politik adalah konsumsi publik. Siapa pun dapat mengaksesnya baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Oleh karena itu, para pelaku politik ini seyogyanya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat baik dari segi sikap maupun tuturan. Sayangnya, perdebatan di acara debat politik kerap kali memunculkan tuturan yang secara kesantunann memberikan preseden buruk pada para pemirsa. Catatan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu menunjukkan kasus-kasus pejabat dan politikus yang bermasalah dengan ucapan mereka yang berujung permintaan maaf seperti kasus Arteria Dahlan, Ahmad Dhani, Ferdinand Hutahaean, dan Basuki Tjahja Purnama (Maelasari; Harsa and Arifulhak; Supardi et al.; Warsiman, Sipahutar, and Nasution; Hamdi).

Para panelis di dalam acara debat politik tentu memerlukan argumentasi yang kuat agar tidak kalah dari lawan debatnya. Oleh karena itu, berbagai macam strategi digunakan agar pendapat-pendapatnya tidak kalah dari lawan debat mereka. Secara disadari atau tanpa disadari, mereka telah melakukan suatu strategi bertutur dalam kegiatan debat politik mereka. Dengan demikian, penelitian tentang strategi bertutur terhadap politisi, pejabat, serta pengamat politik yang kerap berdebat akan memberikan hasil analisis

mendalam yang dapat digunakan oleh pembaca atau masyarakat secara umum untuk dapat menilai—atau bahkan untuk menentukan sikap politik mereka.

Brown dan Levinson menjelaskan bahwa strategi bertutur adalah suatu cara penutur untuk memproduksi tuturan yang dapat dipahami dan menarik perhatian mitra tutur. Dalam hal ini, pendebat politik akan menggunakan strategi bertuturnya untuk membuat lawan debatnya memahami, mematahkan, dan menentang argumentasi mitra tutur. Brown & Levinson membagi strategi bertutur menjadi 5 strategi yaitu strategi: 1) terus terang tanpa basa-basi; 2) dengan basa-basi positif; 3) dengan basa-basi negatif; 4) samar-samar; dan 5) diam atau dalam hati Terus terang tanpa basa-basi adalah berbicara secara langsung dan jujur, tanpa mengelak atau mempermainkan kata-kata. Basa-basi positif melibatkan penggunaan kata-kata lembut dan menghibur, sementara basa-basi negatif melibatkan kritik atau pesan negatif yang disampaikan secara tidak langsung. Berbicara samar-samar berarti menggunakan kata-kata yang tidak jelas atau ambigu, sementara diam atau dalam hati berarti memilih untuk tidak berbicara atau menyimpan pikiran dan perasaan untuk diri sendiri (Brown and Levinson). Oleh karena itu, fokus utama dan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi bertutur dari pejabat dan politisi dalam acara debat di *ILC (Indonesia Lawyers Club)*.

Menganalisis sikap seseorang terhadap masalah, fenomena, dan kebijakan-kebijakan tertentu adalah bidang penelitian *Natural Language Processing (NLP)* yang saat ini sedang banyak dilakukan. Dalam banyak kajian, area penelitian ini telah didefinisikan sebagai *Stance Detection (SD)*, yaitu sikap seorang penulis dan/atau pembicara yang mendukung, menentang, atau netral terhadap pernyataan atau peristiwa yang ditargetkan, orang, organisasi, pemerintah kebijakan, gerakan, dll. (Mohammad, Sobhani, and Kiritchenko; Lai et al.). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kuntarto tentang bahasa dan kekuasaan politik oposisi di Indonesia yang menunjukkan bahwa oposan cenderung memilih diksi sarkastik, menyudutkan, dan apriori (Kuntarto). Bahasa dalam politik lebih digunakan sebagai wacana membentuk kekuasaan dibandingkan alat interaksi manusia dengan pertimbangan kesantunan dan interaksi yang baik. Penelitian Herman juga membahas tentang strategi bertutur dalam gelar wicara politik untuk mencari tuturan menolak dan mengkritik. Dengan demikian, Kebaruan penelitian ini akan menunjukkan strategi tutur para politisi dan pejabat publik dalam mempertahankan argumentasinya di depan masyarakat sehingga dapat menstimulasi pikiran politik rakyat berdasarkan gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh para pembicara politik (Herman and Manaf).

Hasil penelitian yang didapatkan akan memberikan kontribusi yang penting bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat pada umumnya. Pada masyarakat, hasil penelitian akan menjadi penting agar mereka dapat memahami kondisi dan situasi politik yang terjadi di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini, mereka akan bisa menilai para politisi dan pejabat hingga menentukan sikap politik sebelum menjalani proses elektoral kembali pada tahun 2024.

Metode

Dalam menganalisis secara mendalam terkait strategi bertutur pejabat dan politisi dalam kegiatan debat, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyimak, menginterpretasikan, mengorganisasikan, hingga mengklasifikasikan temuan-temuan penelitian sesuai dengan kategori analisis (Moleong). Adapun objek penelitian adalah segala macam tuturan yang diproduksi oleh penutur dalam tayangan *Indonesia Lawyers Club (ILC)* pada video berjudul: *Inilah Sesi-Sesi Menegangkan!!! Saat Narasumber Ilc Silang Pendapat, Sampai Akhirnya Berujung Debat*, yang merupakan potongan dari episode berjudul *Pasal Penghinaan Presiden & Pejabat Negara Masih Dicantumkan Situasi Di Ilc Memanas!!!* yang ditayangkan di Kanal YouTube resmi *ILC* pada 11 Juli 2022.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari tuturan beberapa subjek penelitian dalam video tersebut yaitu Albert Aries (Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI), Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara), Usman Hamid (Aktivis HAM), Arteria Dahlan (Anggota DPR-Anggota PDIP), dan moderator Karni Ilyas. Video tersebut dapat diakses pada URL: https://www.youtube.com/watch?v=MlZqkxXgw_E&t. Teknik pengumpulan data yang diimplikasikan dalam penelitian ini yaitu simak-catat dengan cara menyimak secara intensif video tayangan sumber data yang termasuk ke dalam kategori strategi bertutur. Metode simak catat ini adalah suatu teknik yang diterapkan dalam suatu penelitian bahasa dengan cara menyimak penuturan bahasa sasaran yang diteliti. Setelah melakukan penyimak secara intensif, data-data yang dibutuhkan sesuai kategori analisis dicatat,

dikategorisasi, dan dianalisis (Sudaryanto). Sumber data penelitian yang utama adalah tuturan dari para panelis di video yang merupakan pejabat dan politisi di Indonesia yang diundang dalam acara *ILC*.

Selanjutnya, analisis data menggunakan teknik parafrase (ubah wujud) dengan cara mengutip produksi tuturan subjek penelitian dan mengembangkannya berdasarkan kategorisasi strategi bertutur. Teknik analisis data ini dibantu dengan instrumen penelitian yang berasal dari peneliti sendiri dengan menggunakan teori strategi bertutur antara lain (1) strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi, (2) strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan positif, (3) strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif, (4) strategi bertutur samar-samar, dan (5) strategi diam atau strategi bertutur dalam hati (Brown and Levinson). Adapun keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan verifikasi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil dan Diskusi

Video dengan judul *Inilah Sesi-Sesi Menegangkan!!! Saat Narasumber Ilc Silang Pendapat, Sampai Akhirnya Berujung Debat*, merupakan potongan video diskusi yang membahas tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengundang banyak perbincangan di masyarakat. Dalam video tersebut, tokoh Feri Amsari sebagai Pakar Hukum Tata Negara memberikan pandangan awal terkait pasal-pasal di RKUHP yang disebut menutupi ruang demokrasi yang dianggap bermasalah dan meminta presiden untuk tidak terlalu menanggapi kritik terhadap beliau. Argumen dari Feri Amsari kemudian dibantah oleh Albert Aries sebagai Anggota Tim Sosialisasi RKUHP dari Kemenkumham RI. Albert berpendapat sebaliknya bahwa presiden harus diberikan perlindungan harkat dan martabat dirinya. Terjadi perdebatan cukup intensif antara Feri Amsari dan Albert Aries sebelum ditengahi oleh moderator, Karni Ilyas.

Setelah itu, Usman Hamid, sebagai Aktivis HAM, memberikan dukungan argumentasi kepada Feri Amsari. Usman memberikan tanggapan bahwa pasal RKUHP merupakan pasal kolonial. Argumennya diperkuat bahwa presiden bukanlah ratu dan bukan raja sehingga wajib dikritik. Presiden dipilih oleh rakyat sehingga rakyat berhak mengkritik dan berhak mengkerasi kinerja presiden. Pada bagian ini, Albert Aries juga memberikan bantahan-bantahan terhadap argumentasi dari Usman Hamid sehingga terjadi perdebatan yang cukup intensif juga. Terakhir, Arteria Dahlan sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP memberikan bantahan terhadap kritikan pada mahasiswa, Feri Amsari, dan Usman Hamid yang menganggap pengaduan RKUHP ke MK adalah mempersulit rakyat.

Dari pengamatan terhadap diskusi dan debat tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa terdapat dua posisi, yaitu posisi yang setuju RKUHP dan posisi yang tidak setuju terhadap RKUHP. Tokoh Feri Amsari dan Usman Hamid, serta mahasiswa berada pada posisi kontra terhadap RKUHP. Tokoh Albert Aries berada pada posisi yang mendukung RKUHP.

Hasil pengamatan tersebut kemudian ditranskripsikan dan dikategorisasikan berdasarkan teori strategi bertutur dan menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1 Transkripsi dan Analisis Strategi Bertutur Video Debat RKHUP

No	Penutur	Produksi Tuturan	Jenis Strategi Bertutur
1	Feri Amsari	Pasal-pasal seperti ini sedang berupaya menutupi ruang-ruang demokrasi yang sebenarnya sedang bermasalah akhir-akhir ini. Oleh karena itu menurut saya yang presiden jangan terlalu membuka kuping, atau kalau tidak jadi Pak RT saja.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
2	Albert Aries	Tidak berlebihan mungkin kalau saya sebut Presiden itu adalah <i>Primus inter pares</i> . <i>The First Amog Equal</i> , artinya pertama dari sederajat. Itu yang membedakan <i>Kenapa</i> ada pasal juga penghinaan terhadap pejabat pasal 316 KUHP. Ini <i>lho legal reasoning</i> yang harus ditangkap oleh seorang Bang Feri amsari. <i>Nah</i> itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau pasal 316 itu <i>aja</i> ada penghinaan terhadap pejabat, <i>masa</i> iya presiden tidak diberikan semacam perlindungan atas harkat dan martabat dirinya gitu.	Strategi basa-basi kesantunan positif.
3	Feri Amsari	Saya mau bantah, Bang. Karena ada kekuasaan yang besar di dalam diri Presiden, maka tidak boleh diberikan kemudian ruang, dipersenjatai dia, untuk mempidanakan warga negaranya sendiri. Kalaulah presiden mempidanakan warga negara sendirinya, apa kata dunia? Oleh karena itu, logika Albert yang perlu dijermihkan terkait kemudian kekuasaan presiden dan daulat publik. Jangan diceritakan publik perlu memahami, tidak, pemerintah yang harus memahami publik, bahwa kami berhak mengkritik Anda kalau ketika Anda menjalankan negara penuh dengan kealpaan dan kesalahan.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
4	Albert Aries	Saya rasa tidak demikian, Bang Karni. Saya mau menanggapi boleh? Logika yang disampaikan Bang Feri ini berarti mencampuradukkan antara rumusan norma	Strategi basa-basi kesantunan positif.

		dengan masalah penegakan hukum. Itu yang saya tangkap tadi. <i>Nah</i> tadi, <i>kenapa</i> sih harus memang di ... apa namanya ... diatur perlakuan yang berbeda tadi. Karena memang <i>gini</i> , justru, para mahasiswa, para aktivis, harus bersyukur. Kalau ini tidak diatur sebagai delik aduan, maka konstruksinya sangat mungkin menjadi seperti praktek delik biasa yang dikhawatirkan Bang Feri tadi. Itu logika yang menurut saya bisa dijelaskan dan diterima secara akal sehat. <i>Gitu</i> Bang Karni.	
5	Feri Amsari	Saya bantah, Bang Karni. Sedikit saja. Saya mau mengatakan kalau sudah ada di lihat di pasal lain terhadap setiap warga negara Indonesia, kenapa pula perlu pasal khusus presiden ini? Presiden kan juga warga negara Indonesia. Jadi <i>kenapa</i> (diputus)	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
6	Albert Aries	Jadi Bang Feri pasti tidak bisa membantah bahwa ada kenyataan pada pasal 316 tentang penghinaan terhadap pejabat di KUHP yang Sudah diuji di MK dan dinyatakan masih konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
7	Feri Amsari	Itulah pasal-pasal hasil dari Hindia-Belanda itu.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
8	Albert Aries	Oh Bukan. Pasal 316 itu ada di bab penghinaan yang menurut MK masih layak dipertahankan, tapi sifatnya delik aduan.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
9	Feri Amsari	Pasal-pasal <i>Haatzaai Artikelen</i>	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
10	Albert Aries	Beda, inilah kesalahan. Ini mohon maaf ya. Bang Feri mungkin karena bidangnya hukum tata negara. Saya dengan segala hormat bukan maksud membedakan antara hukum tata pidana dan tata negara. Tetapi begini, pasal <i>Harzaai Artikelen</i> Itu yang Bang Feri maksud dalam pasal 154 yang ada di bab jauh sebelum pasal 310. Jadi tolong ini semacam edukasi publik juga. Itu peletakan bab dan pengaturan bab aja salah, yang Bang Feri sampaikan. Berbeda jauh. Jadi saya mau tegaskan malam hari ini, pasal 316 itu masih ada, penghinaan terhadap pejabat. Mengapa kalau penghinaan terhadap pejabat ada, penginapan terhadap presiden tidak boleh diatur oleh perumus RKUHP. Demikian Bang Karni.	Kesantunan positif.
11	Feri Amsari	Kalau pohonnya sudah beracun, tidak perlu lagi buahnya itu ditunggu. Buahnya itu sudah pasti beracun. Jadi masalah intinya di pohon. Jadi tidak perlu kemudian ... apa ... buahnya dihapuskan, <i>gitu</i> ya, pohonnya tetap ditunggu. <i>Kan nggak</i> mungkin begitu. Kedua, saya mau merespons poin agamais dari ... (diputus)	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
12	Albert Aries	Sebenarnya, Bang. Pohonnya itu RKUHP, buahnya itu pasal. Masa bilang RKUHP pohon beracun? Gak bisa begitu juga.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
13	Feri Amsari	Pak Albert... Saya jelaskan tadi. Ini ada susu, satu naman, baik ini barang. Tapi kalau setetes racun masuk, rusak. Itu makna dari ini. Makanya, saya mau ceritakan teori hukumnya ke Pak Lukman. Itu yang benar. Albert tadi yang salah paham. Dia harus belajar lagi lebih banyak bahwa di dalam hukum itu tidak ada jurusan.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
14	Albert Aries	Maksud saya gini, Bang Lukman, saya siap belajar banyak dari Bang Feri. Tapi begini, menganalogikan RKUHP sebagai pohon... (Perdebatan rumit)	Strategi basa-basi kesantunan positif.
15	Moderator	Saya kira udah cukup.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
16	Usman Hamid	Jadi di satu sisi menggunakan pasal kolonial dengan argumen kebangsaan tapi tidak ada pasal-pasal yang menunjukkan sikap kebangsaan melawan kolonialisme itu. Makanya mahasiswa tetap mengatakan ini pasal kolonial. Tidak ada dekolonisasi, tidak ada demokratisasi. Kenapa tidak ada demokratisasi? Karena yang dikritik adalah seorang Presiden, bukan seorang Ratu, bukan seorang raja. Kalau raja atau ratu tidak dipilih. Kalau presiden dipilih. Karena itu wajib dikritik, wajib dikerasi, karena ia bertanggung jawab atas pilihan rakyat untuk melaksanakan tugas. Jadi, saya kira ada banyak konsep yang keliru dari Wamenkumham yang menurut saya lebih kental nuansa <i>Machtstaat</i> negara kekuasaan, dan lebih mencerminkan perumusan itu karena pelaksanaan tugasnya sebagai petugas pemerintah.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
17	Albert Aries	Saya perlu membela Pak Wamenkumham juga karena beliau senior saya. Artinya <i>gini</i> , yang dilindungi negara itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah kalau pasal 28J juga menegaskan—ini bukan hanya soal ICCPR yang sudah kita ratifikasi—tetapi pasal 28J juga menyebutkan, orang <i>tuh</i> dalam menjalankan haknya juga harus menghormati hak orang lain. <i>Nah</i> , oleh karena itulah ada perbedaan, makanya tadi tidak pernah bisa dibantah oleh Bang Feri. Bahwa ternyata ada pasal penghinaan terhadap pejabat... (Diputus)	Strategi basa-basi kesantunan positif.
18	Usman Hamid	Kalau saya ngga setuju. Penghinaan terhadap pejabat juga nggak perlu menurut saya.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
19	Albert Aries	Tapi itu bunyi putusan MK Bang Usman.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
20	Usman Hamid	Anda seperti mengasumsikan bahwa kita membela MK. Kita tidak membela MK. Kita membela kebebasan.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
21	Albert Aries	Betul. Tapi itu, bunyi putusan MK yang merupakan lembaga penafsir dan penjaga konstitusi kita.	Strategi basa-basi kesantunan positif.
22	Usman Hamid	Untuk apa saya diundang ke sini kalau saya tidak diperbolehkan bertafsir?	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
23	Albert Aries	Boleh. Silakan mengeksaminasi putusan MK tersebut, silakan... (diputus)	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
24	Usman Hamid	Tidak bisa mengukur penafsiran saya berdasarkan ukuran MK. Tidak bisa.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
25	Albert Aries	Betul, betul. Tetapi begini, sebagai final interpreter, putusan MK itu bersifat final and binding. Apapun itu. Nanti ada perkembangan lain, mungkin saja MK bisa	Strategi basa-basi kesantunan positif.

		berubah rasio reasonity-nya. <i>Gitu</i> Bang. Jadi, menghormati dalam menjalankan kebebasan atau mengkritik. Ada juga penghormatan terhadap hak orang lain, Bang Usman.	
26	Usman Hamid	Yang Anda campur adukkan ini, ya, Anda mengasumsikan, bahwa penghormatan hak orang lain itu penghormatan presiden. Tidak ada kata-kata “presiden” di situ.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
27	Albert Aries	Memang tidak ada. Artinya gak bisa diterjemahkan secara literal demikian. Emang ada juga diterjemahkan sebagai misalkan <i>eee...</i> jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya. <i>Kan gak</i> ada juga seperti itu.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
28	Usman Hamid	<i>Loh</i> , saya mau mengatakan yang mau dilindungi individunya, manusianya, bukan presidennya. Dan saya tidak mengatakan seorang Joko yang menjadi presiden tidak harus dilindungi. Dia punya hak dilindungi, sebagai pribadi. Apakah pasalnya ada? Ada. Itu pasal penghinaan secara umum yang dulu disebut sebagai pasal 207 yang <i>recht delicten</i> yang Anda sebut-sebut tadi. Kalau mau melindungi reputasi itu, itu harus dari hasutan kebencian berdasarkan etnis, agama, ras, atau hasutan yang mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi kalau tidak ada elemen kekerasannya, tidak bisa. Sama seperti, ya, misalnya, percobaan pembunuhan presiden, belajar dari peristiwa Cikini. Itu memang harus dilarang. Karena ada kekerasannya, bukan karena penyerangan kehormatan presiden. Presiden itu tidak punya perasaan, yang punya perasaan, orangnya. <i>Nah</i> kalau orangnya yang mau memang dilindungi, Anda tadi sudah bilang kan, apa namanya, <i>recht delicten</i> itu, yang dirujuk oleh MK ketika itu, maksudnya MK adalah kalau sudah ada pasal delik aduan buat semua orang yang dihina, gak perlu ada pasal ini.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
29	Arteria Dahlan	Ya, akses ke MK. Itu tadi, anak muda, jangan kalian bangun kecemasan. Saya kasih contoh, penggelandangan. Gelandangan pernah uji materi di MK, dateng dia, gak sulit aksesnya, MK itu gratis, ya. Ini saya bantah nih.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.
30	Feri Amsari	Saya bantah juga, putusan itu, gelandangan, itu pengujinya mahasiswa saya. Bukan gelandangan.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
31	Arteria Dahlan	Sebentar-sebentar, 207...	Strategi samar-samar
32	Feri Amsari	Tunggu Pak. Pak Arteria.	Strategi samar-samar
33	Arteria Dahlan	Yaudah, saya... Saya... 207.	Strategi samar-samar
34	Feri Amsari	Jadi Anda jangan memberikan berita palsu juga	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
35	Arteria Dahlan	<i>Gak</i> berita palsu, Anda ini tuduhan serius saya memberikan perintah palsu.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
36	Feri Amsari	Ya Anda mengatakan yang menguji itu gelandangan.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
37	Arteria Dahlan	Bukan gelandangan... Bukan... Gelandangan di MK pun bisa mengajukan. Yah.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
38	Feri Amsari	<i>Tuh kan</i> berubah lagi...	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
39	Arteria Dahlan	Bukan berubah, yah.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
40	Feri Amsari	Anda itu..	Strategi samat-samar
41	Arteria Dahlan	Ini tuduhan serius <i>loh</i> .	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
42	Feri Amsari	Masa tuduhan begitu saja serius dan mau menjarakan saya. Silakan! Besok pagi Anda laporkan saya.	Strategi terus terang tanpa basa-basi.
43	Arteria Dahlan	Siapa yang mau memenjarakan kamu? Ini jangan provokatif, Kamu! Yah. Ada <i>gak</i> kalimat saya untuk memenjarakan kamu? <i>Gak</i> ada! Yah. Tapi saya tidak <i>seneng</i> yah, provokasi yang seperti ini. <i>Gak</i> bisa dong.	Strategi basa-basi kesantunan negatif.

Strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Basa-Basi

Aspek pertama yang dianalisis adalah terkait strategi tutur para politisi dan pejabat secara terus terang tanpa basa-basi. Strategi ini merupakan suatu cara penutur dalam menyampaikan gagasannya secara sederhana, lugas, dan tanpa basa basi, tanpa tambahan tuturan lembut atau pun manis sebagai keterangan tambahan (Nurhamida and Tressyalina).

Pada debat terkait kebijakan politik dalam tayangan *Indonesia Lawyers Club* dengan tema RKUHP, strategi bertutur ini pertama kali ditemukan dalam pernyataan Feri Amsari (nomor 3) sebagai pakar hukum tata negara. Dalam pernyataannya, FA menyampaikan bahwa dia hendak membantah pernyataan dari Albert Aries selaku lawan diskusinya. Albert Aries yang sebelumnya menguraikan tentang penjelasan bahwa presiden memerlukan semacam perlindungan atas harkat dan martabat dirinya dari segala macam bentuk penghinaan. Pernyataan AA ini kemudian secara langsung dibantah melalui strategi berterus terang tanpa basa-basi oleh FA. Feri Amsari menjelaskan secara jelas bahwa presiden tidak boleh diberikan ruang untuk mempidanakan warga negaranya sendiri. Dalam keterangan FA di pernyataan ini, tidak ada keterangan-keterangan tambahan yang menunjukkan basa-basi karena setiap gagasannya merupakan ide penting yang perlu disampaikan kepada lawan diskusi.

Strategi tanpa basa-basi selanjutnya masih diproduksi oleh pembicara Feri Amsari (nomor 5). Dalam hal ini, dia mengutarakan secara ketat dan tegas, tanpa keterangan-keterangan tambahan yang tidak fundamental terkait pasal penghinaan presiden yang tidak diperlukan karena sudah ada pasal lain yang melindungi warga negara dari pencemaran nama baik. Posisi presiden dalam argumentasi FA bisa menggunakan posisinya sebagai warga negara untuk melaporkan pencemaran nama baik (yang sudah ada pasalnya), dan tidak perlu membuat pasal baru lagi yang rentan disalahgunakan. Dalam pernyataan pada bagian ini, FA menuturkan secara singkat dan padat tanpa ada tambahan-tambahan keterangan yang repetitif ataupun yang sifatnya berbasa-basi.

Selanjutnya, Albert Aries sebagai Tim Sosialisasi RKUHP menimpali argumentasi nomor 5 dari FA yang juga menggunakan strategi tanpa basa-basi. Dalam pernyataannya (nomor 6), AA menyatakan secara lugas dan langsung bahwa Feri Amsari tidak dapat membantah bahwa ada penghinaan terhadap pejabat KUHP yang telah diujikan di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan AA ini memberikan penjelasan bahwa pasal 316 terkait penghinaan pejabat tidak boleh dibantah karena statusnya sudah diujikan. Pernyataan yang singkat dan lugas ini menunjukkan tidak ada basa-basi di dalam argumentasi AA.

Menimpali pernyataan nomor 6, FA langsung kembali mendebat, tentunya dengan strategi tutur tanpa basa-basi di dalam pernyataannya di nomor 7. Feri Amsari langsung memberikan bantahan bahwa pasal-pasal 316 tentang penghinaan pejabat adalah hasil dari pemikiran-pemikiran Hindia-Belanda yang antikritik. Tuturan tanpa basa-basi ini tentu digunakan untuk memberikan bantahan secara serta-merta, dengan cepat, dan langsung menunjukkan ide gagasan yang ingin diucapkan. Akan tetapi, Albert Aries kembali meneruskan tuturan-tuturannya, tentu mengimbangi gagasan singkat dari FA, dengan menggunakan juga strategi tanpa basa-basi pada nomor 8. AA memberikan bantahan bahwa pasal 316 ada bab penghinaan yang layak dipertahankan. Tidak ada basa-basi dari AA untuk menambah gagasan pada pernyataan tersebut.

FA, dalam pernyataannya nomor 9 juga kemudian langsung menimpali dengan tanpa basa-basi mengeluarkan kata “Pasal-pasal *Haatzaai Artikelen*” terhadap pasal 316 yang menurut AA sebelumnya adalah masih layak dipertahankan. Pasal *Haatzaai Artikelen* (yang tidak dijelaskan maknanya oleh FA), adalah pasal pidana yang diturunkan dari Hindia-Belanda tentang ujaran kebencian, permusuhan, dan penghinaan terhadap kepentingan Belanda dan/atau kelompok yang mendukung Belanda pada saat itu (Hasni, Arifin, and Nurlailasari). Penunjukkan istilah tersebut diungkapkan FA tanpa basa-basi.

Strategi basa-basi selanjutnya dimunculkan kembali oleh Albert Aries pada pernyataan nomor 12. Dalam pernyataannya, AA menimpali FA yang memetaforakan RKUHP sebagai pohon yang beracun, di mana pasalnya adalah buah yang beracun juga. Pernyataan FA ini langsung dibantah (dipotong) tentu dengan strategi basa-basi dengan menyatakan bahwa tidak bisa RKUHP disebut sebagai pohon beracun—tanpa keterangan tambahan lagi yang memperjelas argumentasinya.

Perdebatan dengan menggunakan strategi bertutur tanpa basa-basi juga kemudian terjadi antara Albert Aries dengan Usman Hamid selaku aktivis HAM. Pada tuturan tanpa basa-basi pertama yang dimunculkan oleh UH, dia menanggapi tentang pasal penghinaan presiden dan pasal penghinaan pejabat dari AA pada pernyataan AA nomor 17. Menanggapi itu, Usman Hamid langsung memberikan pernyataan secara tegas bahwa dia tidak setuju dengan pendapat AA pada pernyataan nomor 18. Pasal-pasal penghinaan untuk presiden dan pejabat sama-sama tidak diperlukan. Pernyataan ini diuraikan secara singkat dan tegas tanpa basa-basi dari UH.

Selanjutnya, penggunaan-penggunaan strategi bertutur tanpa basa-basi ini juga terus dikeluarkan oleh para pembicara di acara tersebut sebagai cara mereka untuk terus menimpali lawan bicaranya dalam intensitas debat yang cukup tinggi. Intonasi debat yang cukup tinggi dan sangat dominan strategi tanpa basa-basi terjadi antara Feri Amsari dengan Arteria Dahlan selaku Anggota DPR. Dalam peraduan argumentasi dua tokoh tersebut, baik AD maupun FA (dari pernyataan nomor 29 sampai terakhir) secara bergantian. Bahkan, mereka berdua saling memotong pembicaraan, menggunakan strategi tanpa basa-basi dalam tempo debat yang cukup sengit.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa strategi tutur basa-basi dalam diskusi politik digunakan untuk memberikan penegasan tanpa bertele-tele, mendebat/membantah pernyataan secara tegas dan singkat, hingga digunakan untuk memotong pembicaraan lawan dengan gagasan yang sederhana tapi tepat sasaran makna.

Strategi Bertutur dengan Basa-Basi Kesantunan Positif

Aspek selanjutnya yang dianalisis adalah terkait strategi tutur basa-basi secara positif. Strategi ini biasanya digunakan oleh penutur untuk memberikan keterangan-keterangan tambahan sebagai basa-basi, dengan memberikan pujian, dukungan, bantahan, juga larangan—yang dituturkan dengan diksi-diksi yang positif dan cenderung halus (Saputri et al.). Dalam strategi ini, penutur kerap kali memilih diksi dan permainan kata yang baik meskipun tidak *on point* (langsung pada substansi diskusi).

Strategi basa-basi positif yang pertama ditunjukkan oleh tokoh Albert Aries pada pernyataannya di nomor 2. Dalam produksi tuturannya, AA menggunakan basa-basi yang sangat positif dalam mencitrakan diri presiden. AA memberikan metafor-metafor pada diri presiden dengan diksi-diksi seperti “*Primus Interpares*”, suatu bahasa Latin yang berarti “yang utama dari sederajat (Priyowidodo). Atau dalam bahasa Inggris disebut “*The First Among Equal*” dengan makna yang sama (Wang and Fu). Pemilihan-pemilihan diksi tersebut adalah basa-basi positif dari AA untuk memberikan citraan kepada presiden yang menjadi subjek dalam pernyataannya meskipun sebagai keterangan tambahan yang kurang substansial dan panjang lebar.

AA juga kembali menggunakan strategi tutur basa-basi positif pada pernyataannya di nomor 4. Konteks penutur dan mitra tutur dalam hal ini terjadi antara AA dan FA. Akan tetapi, dalam tuturannya, AA menimpali pernyataan FA dengan menyapa moderator dan bertanya kepada moderator apakah dia boleh menjawab atau tidak. Sapaan terhadap moderator dalam perdebatannya dengan FA menunjukkan basa-basi secara halus dan positif. Dalam tuturan ini pun, AA menuturkan penjelasan tentang nilai-nilai positif dari RKUHP di mana semua elemen seperti mahasiswa dan aktivis harus bersyukur dengan adanya rancangan undang-undang tersebut. Ungkapan kekhawatiran-kekhawatiran dengan pilihan diksi seperti “*khawatir*”, “*logika*”, “*akal sehat*”, dan penyapaan terhadap moderator padahal sedang berbicara pada FA menunjukkan basa-basi secara halus/positif.

Tokoh Albert Aries nampaknya memang kerap menggunakan strategi bertutur basa-basi positif dalam perdebatan dengan lawan tuturnya. Strategi ini digunakan untuk menjaga citra diri dan institusi di mana dia berafiliasi. Pada tuturan AA nomor 10 misalnya, dengan diksi-diksi seperti “*Ini mohon maaf, ya.*”, “*dengan segala hormat*”, dengan tujuan agar berbasa-basi walaupun sebenarnya tidak masuk kepada substansi pembicaraan. Bahkan, di pernyataan AA nomor 14, dia menyampaikan pernyataan basa-basi dengan kalimat, “*saya siap belajar dari Bang Feri, tapi...*”, menunjukkan bahwa sebelum membantah pernyataan FA, AA berbasa-basi dengan menyatakan bahwa dia bersedia belajar dari FA.

Selanjutnya, pada pernyataan AA nomor 17, dia kembali menggunakan kesantunan berbahasa dengan basa-basi halus/positif. AA menimpali pernyataan dari Usman Hamid yang mengkritisi RKUHP secara tegas bahwa pasal tersebut sangat kolonial dan jauh dari nilai-nilai demokratis. Menurut AA, yang dilindungi negara dalam RKUHP adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan individu sehingga perlu ada perlindungan hak yang diatur dalam pasal 28J RKUHP. AA dalam pernyataan ini menggunakan basa-basi dengan mengatakan “*Saya perlu membela Pak Wamenkumham, juga karena beliau senior saya*”. Diksi “*Perlu membela*”, “*karena dia senior*” jelas menunjukkan basa-basi dari AA, selain untuk mengangkat dan melindungi citra Wamenkumham, juga menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki kedekatan secara emosional.

Pada pernyataan AA nomor 21, dia juga menunjukkan basa-basi positif, dengan diksi yang dipilih secara halus dan baik untuk meninggikan citra dari Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataannya, AA menyebutkan keterangan tambahan “*penjaga konstitusi kita*” yang berfungsi sebagai basa-basi dan tidak memengaruhi substansi pembicaraan tentang MK. Bahkan, di percakapan AA nomor 25 sebagai basa-basi positif, AA menggunakan diksi “*sebagai final interpreter*” yang merujuk pada subjek MK, untuk menunjukkan finalisasi peran MK agar tidak dibantah oleh lawan bicara melalui cara yang halus dan positif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa strategi tutur basa-basi secara positif diproduksi oleh penutur dalam debat politik untuk membalikkan pernyataan dari mitra tutur yang cenderung menekan/mengintimidasi topik tertentu. AA dalam hal ini sebagai juru bicara dan tim RKUHP banyak menggunakan strategi ini untuk melindungi citra diri institusinya, untuk memberikan pujian kepada atasannya, dan menunjukkan nilai-nilai positif pada objek pembahasan diskusi, yaitu RKUHP. Penggunaan strategi basa-basi positif kerap menggunakan diksi-diksi yang halus semata-mata untuk memberikan keterangan-keterangan tambahan sebagai penambah keterangan dari argumentasi yang dikeluarkan. Biasanya, basa-basi ini muncul hanya sekadar untuk penambah gagasan yang bersifat nonsubstansial.

Strategi Bertutur dengan Basa-Basi Kesantunan Negatif

Terkait strategi tutur dengan basa-basi negatif, strategi ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan-keterangan tambahan (basa-basi) dalam upaya untuk menimpali tuturan dari mitra tutur, melarang, membantah, memberikan imbauan, tetapi dengan pilihan-pilihan kata yang cenderung negatif (Zuve and Ananda).

Berdasarkan hasil analisis pada transkripsi perdebatan tentang RKUHP antara para pengamat politik, pejabat, dan politisi di acara *ILC YouTube*, strategi ini pertama sekali dimunculkan oleh tokoh Feri Amsari pada tuturan nomor 1. Pada produksi tuturnya, FA menyatakan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP akan menutupi ruang demokrasi, dan seterusnya. Inti dari pernyataan-pernyataan FA adalah agar presiden tidak terlalu mendengarkan kritikan dan membalas semua ucapan masyarakat dengan delik hukum. Akan tetapi, FA berbasa-basi bahwa presiden terlalu mendengarkan rakyat dengan diksi "*terlalu membuka kuping*", bahkan dengan diksi yang cukup menyerang, "*jadi Pak RT saja!*". Diksi tersebut sebenarnya adalah suatu basa-basi yang disampaikan secara negatif. Hal ini karena panelis mengomparasikan posisi presiden sebagai pemimpin tertinggi suatu negara dengan jabatan RT. Jabatan RT dalam tata negara di Indonesia merupakan jabatan terbawah (Zuhdi, Ferizko, and Melinda). Menyarankan presiden untuk sebaiknya menjadi RT menunjukkan kesantunan yang negatif.

FA juga mengeluarkan tuturan basa-basi dengan kesantunan negatif pada pernyataan nomor 11. Dalam pernyataannya, FA menganalogikan bahwa RKUHP adalah suatu pohon beracun yang berbahaya jika disahkan dan diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam pernyataan-pernyataan ini, diksi-diksi yang menunjukkan basa-basi negatif antara lain "*pohon beracun*", "*buahnya pasti beracun*". Kedua diksi tersebut memiliki konotasi negatif. FA dalam hal ini mengandaikan RKUHP melalui basa-basinya sebagai suatu pohon beracun, atau suatu media/alat yang berbahaya bagi masyarakat dengan analogi-analogi berdiksi negatif.

Untuk terus mengkritisi RKUHP dan memberikan semacam balasan disertai nuansa intimidasi, FA kembali menggunakan strategi bertutur basa-basi kesantunan negatif dalam tuturannya di nomor 13. Dalam pernyataannya, FA berbasa-basi masih dengan metafor-metafor dan basa-basi berdiksi negatif seperti "*racun*", "*rusak*", "*Dia (Albert) harus belajar lagi lebih banyak*", menunjukkan keterangan membantah dan menimpali mitra tuturnya dengan diksi yang negatif. Bahkan, klausa, "*Dia harus belajar lagi lebih banyak*" cukup intimidatif kepada mitra tuturnya yang kemudian mengesankan bahwa mitra tutur FA tidak memahami materi dan filosofis materi yang tengah didiskusikan.

Selain FA, Usman Hamid sebagai aktivis HAM juga menggunakan strategi bertutur basa-basi dengan kesantunan negatif. Dalam pernyataan UH pada nomor 16, dia menjelaskan tentang pasal dalam RKUHP sebagai pasal kolonial dan anti demokrasi. Diksi-diksi yang diproduksi oleh FA seperti, "*kolonial*" yang berkonotasi bentuk penjajahan dan pengintimidasian, lalu diksi "*Presiden wajib dikerasi*", "*Konsep keliru dari Wamenkumham*", adalah pilihan kata yang secara jelas dan ketat memberikan konotasi negatif yang dikemas sebagai bentuk basa-basi yang menjelaskan panjang lebar tentang sisi negatif RKUHP. Ada pula diksi "*Machstaat*" yang berarti legitimasi tindakan negara berdasarkan kepemilikan kekuasaan yang ditujukan kepada pemegang kebijakan oleh UH (Soemarwi). Bahkan, di pernyataan UH nomor 28, dia menggunakan diksi, "Presiden tidak punya perasaan" untuk menegaskan bahwa presiden adalah objek yang tidak boleh tidak dikritisi oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dilihat bahwa strategi bertutur basa-basi dengan kesantunan negatif lebih digunakan oleh penutur untuk memberikan bantahan terhadap tuturan dari lawan debatnya. Pemilihan-pemilihan diksi yang cenderung berkonotasi negatif dalam basa-basi kesantunan ini dimaksudkan untuk membantah, melawan, hingga menyerang argumentasi mitra tutur yang coba mempertahankan gagasannya. Akan tetapi, strategi ini tidak hanya digunakan oleh penutur yang menyerang produk politik dari mitra tutur. Pernyataan Arteria Dahlan pada nomor 29, dalam membela produk RKUHP, dia menggunakan diksi "*Anak muda*" untuk memaknai peran mahasiswa sebagai pihak yang muda dan kurang pengalaman, diksi "*gelandangan*", "*jangan kalian bangun kecemasan*", di mana diksi-diksi tersebut merupakan bentuk strategi basa-basi dengan kesantunan negatif yang memberikan konotasi kurang baik bagi para pendengarnya.

Strategi Bertutur Samar-Samar

Terkait strategi bertutur samar-samar, strategi ini digunakan untuk menuturkan pernyataan dalam dua hal. *Pertama*, penutur menuturkan sesuatu untuk membiarkan si penutur menafsirkan sendiri maksud

tuturannya. *Kedua*, penutur menuturkan gagasannya tetapi secara kurang jelas (samar-samar) saat didengarkan oleh mitra tuturnya.

Dalam debat politik seperti dalam penelitian ini, strategi samar-samar biasanya muncul untuk menimpali lawan tutur dalam debat tanpa peduli pada ketuntasan argumentasi atau tuturan dari mitra tuturnya tersebut. Seperti pada tokoh Arteria Dahlan dan Feri Amsari yang saling bertutur saat mereka sedang mengeluarkan gagasan masing-masing. AD dengan argumentasinya terus berbicara, di sisi lain, FA juga sebagai mitra tutur sama-sama berbicara sehingga tuturan-tuturan dari mereka cenderung tersamar dan membuat pendengar coba menafsirkan sendiri makna dari tuturan yang mereka produksi. Dalam tuturan samar ini, penutur hendak memotong lawan bicara sebagai cara untuk menekan dan memberikan perlawanan atas gagasan yang diucapkan, tidak peduli apakah gagasannya tersebut sudah tuntas atau belum.

Melalui strategi ini, penutur yang kalah dalam penekanan dan/atau sengaja mengalah akan menghentikan tuturannya dan membiarkan mitra tutur melanjutkan pernyataan-pernyataannya. Strategi samar-samar ini cukup sering terjadi dalam diskusi dan debat, khususnya dalam debat-debat dengan tema politik, karena antara satu kubu dengan kubu lain cenderung tidak ada yang mau mengalah.

Strategi Diam atau Strategi Bertutur Dalam Hati

Dalam analisis terhadap debat politik berdasarkan strategi bertutur bahasa, tidak ditemukan strategi diam atau bertutur dalam hati. Hal ini tentunya sesuai dengan tuntutan dari diskusi dan debat politik, di mana narasumber atau peserta debat harus terus menimpali argumentasi dari lawan bicaranya, baik dengan argumentasi balik, dengan data, maupun dengan strategi-strategi tutur yang bisa menimpali mitra tutur debatnya (Aziz).

Simpulan

Strategi tanpa basa-basi digunakan untuk debat secara taktis menimpali lawan tutur tanpa basa-basi yang tidak substansial. Strategi ini digunakan oleh siapapun dalam forum debat. Selanjutnya, strategi kesantunan positif biasanya cenderung digunakan dalam debat kebijakan politik oleh pihak yang mendukung atau mewakili pemegang kebijakan politik tersebut. Penggunaan basa-basi positif untuk menjaga citra institusi yang berada di belakangnya. Berbeda dengan strategi basa-basi positif, strategi basa-basi kesantunan negatif dalam debat tentang kebijakan politik biasanya digunakan oleh penutur dari pihak oposisi yang memberikan kritisi terhadap kebijakan politik yang diperbincangkan. Strategi basa-basi negatif dalam hal ini digunakan untuk membantah, memberikan analogi-analogi, dan penjelasan-penjelasan negatif terkait objek diskusi yang merupakan produk kebijakan politik. Biasanya, diksi-diksi yang digunakan memproduksi strategi basa-basi negatif cenderung memiliki konotasi negatif dalam upaya menunjukkan nilai-nilai minus dari kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya, strategi samar-samar digunakan oleh penutur dalam debat politik, penutur hendak memotong lawan bicara sebagai cara untuk menekan dan memberikan perlawanan atas gagasan yang diucapkan, tidak peduli apakah gagasannya tersebut sudah tuntas atau belum. Melalui strategi samar-samar ini, penutur yang kalah dalam penekanan dan/atau sengaja mengalah akan menghentikan tuturannya dan membiarkan mitra tutur melanjutkan pernyataan-pernyataannya. Strategi samar-samar ini cukup sering terjadi dalam diskusi dan debat, khususnya dalam debat-debat dengan tema politik, karena antara satu kubu dengan kubu lain cenderung tidak ada yang mau mengalah. Terakhir, dalam analisis terhadap debat politik berdasarkan strategi bertutur bahasa, tidak ditemukan strategi diam atau bertutur dalam hati.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu proses dan penyelesaian penelitian ini. Terkhusus kepada Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd. dan Bapak Dr. Ifan Iskandar, M.Hum. atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Puslapdik dan LPDP atas Beasiswa Pendidikan Indonesia yang penulis terima sebagai bekal moral dan material dalam menempuh pendidikan doktor di Universitas Negeri Jakarta.

Daftar Rujukan

Anshori, Akhyar. "Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2.2 (2018): 132–144. Print.

- Aziz, Abdul. *Sosiopragmatik Politik: Kajian Sosiopragmatik Dalam Debat Pilkada*. Syiah Kuala University Press, 2022. Print.
- Bjørnskov, Christian, and Martin Rode. “Regime Types and Regime Change: A New Dataset on Democracy, Coups, and Political Institutions.” *The Review of International Organizations* 15.2 (2020): 531–551. Web.
- Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson. *Politeness: Some Universal in Language Usage*. Cambridge: University Of Cambridge Press, 1987. Print.
- Curlin, Farr A., and Daniel E. Hall. “Regarding Plan B: Science and Politics Cannot Be Separated.” *Obstetrics & Gynecology* 105.5, Part 1 (2005): 1148–1150. Web.
- Hamdi, Saipul. “Pilkada Rasa Pilpres: Al-Maidah 51 Dan Politisasi Simbol Agama Dalam Kontestasi Politik Di Pilkada DKI Jakarta.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 24.1 (2021): 9–22. Print.
- Harsa, Wiwien Pratiwi, and Arifulhak Arifulhak. “A Forensic Linguistics Study of Provocative Speech Acts by Politicians on Social Media Platforms.” *English Teaching and Linguistics Journal (ETLiJ)* 3.2 (2022): 126–134. Print.
- Hasni, Nadia Nuraini, Faizal Arifin, and Ella Nurlailasari. “Haatzaai Artikelen: Pasal Karet Dalam Hukum Kolonial Di Hindia Belanda.” *Historia Madania* 5.1 (2021): 12–31. Print.
- Herman, Hidayat, and Ngusman Abdul Manaf. “Strategi Bertutur Mengkritik Dan Menolak Oleh Politikus Dalam Gelar Wicara Wacana Politik Di Televisi Dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran.” *Jurnal Basicedu* 6.4 (2022): 6078–6087. Web.
- Hermawan, Iyep Candra. “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia.” *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* 10.1 (2020): 1–19. Print.
- Kuntarto, Eko. “Bahasa dan Kekuasaan Politik Oposan di Indonesia: Analisis Wacana Kritis.” *Jurnal Kiprah* 6.2 (2018): 37–47. Web.
- Kurniawati, Wati et al. “Kekuasaan Semantik Dalam Analisis Wacana Kritis Debat Capres-Cawapres.” *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 11.1 (2022): 165. Web.
- Lai, Mirko et al. “Multilingual Stance Detection in Social Media Political Debates.” *Computer Speech & Language* 63 (2020): 101075. Web.
- Maelasari, Neneng. “Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Kompas.Com Tentang Permintaan Maaf Arteria Dahlan.” *METAMORFOSIS* 15.1 (2022): 35–44. Print.
- Mohammad, Saif M., Parinaz Sobhani, and Svetlana Kiritchenko. “Stance and Sentiment in Tweets.” *ACM Transactions on Internet Technology* 17.3 (2017): 1–23. Web.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2013. Print.
- Nurhamida, N, and T Tressyalina. “Strategi Bertutur Dalam Tindak Tutur Ekspresif Bahasa Indonesia Pada Kegiatan Diskusi.” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8.4 (2019): 21–29. Print.
- Priyowidodo, Gatut. “Harapan Baru, Presiden Baru.” *Tabloid Mitra Indonesia* 76.113 (2015): 21–23. Print.
- Saputri, Vioni et al. “Kesantunan Berbahasa Dalam Tindak Tutur Acara Talkshow Kick Andy.” *Madrasatuna* 2.2 (2022): 78–89. Print.
- Soemarwi, Vera W. S. “Meligitimasi Tindakan Negara Berdasarkan Kekuasaan (MACHSTAAT).” *Jurnal Yudisial* 12.2 (2019): 141. Web.
- Sudaryanto. *Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University, 2015. Print.
- Supardi et al. “Language as Evidence in the Judicial Process of Fake News of Ferdinand Hutahaean’s Tweet Viewed from Indonesian Legal Provisions.” *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 4.4 (2022): 242–248. Web.
- Wang, Zhaohui, and Yuheng Fu. “Local Politics and Fluctuating Engagement with China: Analysing the Belt and Road Initiative in Maritime Southeast Asia.” *The Chinese Journal of International Politics* 15.2 (2022): 163–182. Print.
- Warsiman, A. Sipahutar, and S.H. Nasution. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Normatif* 1.2 (2021): 77–81. Print.
- Wijayanti, Amelia Resti, and Rendro Dhani. “Talk Show Politik ‘Mata Najwa’ Dan Pengaruhnya Terhadap Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.6 (2022): 8016–8031. Print.

- Zuhdi, Sulaiman, Adia Ferizko, and Pebriana Melinda. "Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3.1 (2020): 49. Web.
- Zuve, Farel Olva, and Refisa Ananda. "Strategi Bertutur Media Daring Kompas Selama Masa Pilpres 2019." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9.3 (2022): 307. Web.